

BAB V

KESIMPULAN

Peristiwa Gerakan 30 September membawa perubahan besar terhadap perjalanan Indonesia. Melalui peristiwa ini menjadi akhir kekuasaan Sukarno dan membuka jalan bagi Soeharto dan Angkatan Darat untuk berkuasa di Indonesia dalam periode yang dikenal sebagai Orde Baru. Sementara itu, masih terdapat puluhan ribu orang-orang tahanan politik PKI. Ketika para tahanan politik ini mulai dibebaskan dari 1971-1977, pemerintah tetap mengawasi orang-orang ini. Rezim Orde Baru menjadikan PKI dan ideologi komunisme sebagai hal yang terlarang. Mereka menganggap komunisme sebagai 'bahaya laten'. Meskipun ia telah dihancurkan namun ia tetap memiliki peluang untuk muncul kembali. Sebagai orang-orang yang pernah memiliki hubungan dengan PKI dan ideologinya, pemerintah merasa khawatir bahwa setelah dilepaskan dan hidup kembali di masyarakat, para eks tapol ini akan kembali berusaha untuk menghidupkan PKI dan Komunisme. Untuk itu, Orde Baru berusaha untuk mengontrol orang-orang tadi agar tidak melakukan apa yang ditakutkan oleh negara.

Pada awalnya, negara menggunakan cara-cara represif untuk menghancurkan PKI, dalam hal ini terdapat praktek dominasi oleh negara. Setelah Partai dan berbagai organisasi sebas dengannya dibubarkan, negara menangkap puluhan ribu anggotanya. Pada masa ini terjadi kekerasan massal yang mengakibatkan ribuan

orang tewas. Sebagian besar anggota PKI yang ditangkap itu menjadi tahanan politik. Tidak diketahui secara pasti berapa orang yang dipenjara pada periode ini. Pada 1971 beberapa dari tahanan politik ini mulai dibebaskan. Puncaknya adalah sebagian besar dari mereka dibebaskan pada 1977, meskipun sejumlah tahanan tetap dipenjara untuk beberapa tahun selanjutnya.

Meskipun telah dibebaskan, negara tetap mengawasi para eks tahanan politik ini. Negara (Orde Baru) menganggap mereka masih terpapar paham komunis dan kejahatan pikiran. Untuk itu mereka perlu untuk diawasi dan dibina. Pada tahap ini, Orde Baru berusaha untuk menanamkan hegemoninya kepada masyarakat Indonesia. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh Orde Baru dalam kampanye pengawasan dan pembinaan terhadap Eks tahanan politik PKI. Dalam hal ini, pemerintah berusaha untuk menanamkan hegemoninya terhadap para eks tahanan politik Gerakan 30 September ini. Berbeda dengan kekerasan yang terjadi pada periode 1965-1966, Orde Baru berusaha untuk menciptakan relasi kekuasaan yang bersandar dari hukum dan ideologi. Pemerintah berusaha untuk menanamkan ideologi bahwa PKI dan komunisme adalah suatu kejahatan.

Dalam bidang pengawasan, pemerintah memegang data diri dan mengawasi gerak-gerik mereka. Pengawasan ini kemudian mempengaruhi kehidupan para eks tapol Gerakan 30 September karena menjadi dasar pembatasan-pembatasan yang mereka alami. Mereka dilarang untuk menjadi guru, PNS, tentara/polisi, kiayi,

pendeta dan profesi lain yang berhubungan dengan masyarakat. Selain itu mereka juga dilarang untuk berkarir di berbagai perusahaan BUMN.

Sedangkan dalam hal pembinaan terhadap para eks tapol Gerakan 30 September ini dilakukan dengan cara menanamkan doktrin bahwa PKI dan komunis itu jahat, mereka bersalah karena pernah terlibat dalam hal itu. Dengan begitu diharapkan mereka dapat meninggalkan paham komunis dan menjadi seorang warga negara yang pancasilais. Pada periode tertentu, para eks tapol Gerakan 30 September ini dikumpulkan untuk diberikan ceramah-ceramah tentang Pancasila dan bahaya komunisme dengan tujuan mengubah sikap mental mantan tahanan politik dari orientasi komunis/PKI ke orientasi Pancasila dan UUD '45.

Dalam kehidupannya, selama para eks tapol Gerakan 30 September ini berperilaku baik dan tidak dianggap melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dan kestabilan, mereka dibiarkan untuk hidup bebas. Meskipun ditemukan beberapa laporan mengenai eks-tahanan politik Gerakan 30 September di Sumatera Barat yang melakukan tindakan yang mencurigakan, namun secara umum kebijakan pengawasan dan pembinaan pemerintah mengindikasikan PKI dan komunisme tidak benar-benar bangkit lagi setelah kehancurannya pada 1965-1966. Dari berbagai kebijakan Orde Baru, membuktikan bagaimana negara melakukan dominasi dan hegemoni untuk mengawasi dan membina kehidupan para eks tahanan politik di Sumatera Barat sebagai bentuk kewaspadaannya terhadap kemungkinan kebangkitan kembali Komunisme di Indonesia.